

TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS WALHI DALAM LITIGASI IKLIM PULAU PARI TERHADAP HOLCIM TAHUN 2022-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas upaya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam membangun jaringan advokasi transnasional untuk mendukung litigasi iklim masyarakat Pulau Pari terhadap Holcim pada 2022-2025. Kerentanan ekologis akibat krisis iklim dan minimnya dukungan negara mendorong masyarakat mencari keadilan hukum di tingkat internasional. Penelitian kualitatif dengan studi kasus ini menggunakan teori *Transnational Advocacy Networks* (TAN) melalui analisis data wawancara dan studi dokumen. Temuan dari penelitian ini menunjukkan WALHI bertindak sebagai simpul jaringan (*hub organization*) yang menghubungkan warga lokal dengan organisasi global (HEKS/EPER dan ECCHR) melalui mekanisme *Boomerang Pattern* untuk mengatasi keterbatasan yurisdiksi domestik. Jaringan ini menerapkan empat strategi TAN secara efektif: penyebaran kampanye keadilan iklim (*Information Politics*), penggunaan narasi "Menolak Tenggelam" (*Symbolic Politics*), penggalangan dukungan dari Komnas HAM dan aktor politik Eropa (*Leverage Politics*), serta desakan agar Holcim mematuhi komitmen dekarbonisasinya (*Accountability Politics*). Hasil temuan dari penelitian ini mengemukakan bahwa advokasi transnasional ini berhasil memperkuat posisi masyarakat, dibuktikan dengan putusan Pengadilan Kanton Zug pada 2025 yang menyatakan gugatan tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai preseden penting dalam litigasi iklim global.

Kata Kunci: Litigasi Iklim, Holcim, *Transnational Advocacy Networks*, *Boomerang Pattern*, Pulau Pari.

WALHI's TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS IN THE 2022-2025 PULAU PARI CLIMATE LITIGATION AGAINST HOLCIM

ABSTRACT

This study discusses the efforts of the Indonesian Forum for the Environment (WALHI) in building transnational advocacy networks to support the climate litigation of the Pari Island community against Holcim from 2022 to 2025. Ecological vulnerability due to the climate crisis and the lack of state support prompted the community to seek legal justice at the international level. This qualitative study employs a case study design and utilizes the Transnational Advocacy Networks (TAN) theory, analyzing data gathered from interviews and document studies. The results indicate that WALHI acts as a hub organization connecting local residents with global organizations (HEKS/EPER and ECCHR) through the Boomerang Pattern mechanism to overcome domestic jurisdictional limitations. This network effectively implements four TAN strategies: disseminating climate justice campaigns (Information Politics), employing the "Refusing to Sink" (*Menolak Tenggelam*) narrative (Symbolic Politics), mobilizing support from the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) and European political actors (Leverage Politics), and pressuring Holcim to comply with its decarbonization commitments (Accountability Politics). In conclusion, this transnational advocacy successfully strengthens the community's position, as evidenced by the 2025 ruling of the Zug Cantonal Court declaring the lawsuit admissible, establishing a significant precedent in global climate litigation.

Keywords: Climate Justice, Climate Litigation, Holcim, Transnational Advocacy Networks, Boomerang Pattern, Pari Island.